

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 06 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Hj. Hasriyani, SH, MM

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 197307172003082008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Sumber Daya Organisasi	2
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A.Strategi dan Kebijakan	12
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja.....	14
B. Analisis Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK	15
C. Pengungkapan Renstra yang belum dapat diukur ditahun 2021	8
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	37
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III Sasaran	38
C. Langkah-langkah yang akan dilakukan tahun berikutnya	40
D. Pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja Baru yang sesuai dengan renstra	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2020.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2020.....	3
Tabel 1.3 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai per November 2020.....	4
Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November 2020.....	4
Tabel 1.5 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Per November 2020.....	5
Tabel 1.6 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per November.....	5
Tabel 2.1 Strategi Kebijakan.....	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja dan Target.....	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	14
Tabel 3.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian Yang ada di PK.....	16
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi.....	18
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2019-2020.....	19
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra.....	21
Tabel 3.7 Analisa Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan.....	26
Tabel 4.1 Analisis Hambatan.....	38
Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Sumberdaya Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2021 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 48 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 24 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai

Negeri dan Tenaga kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM

Table 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2021

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	5	10	15
2.	Bidang Industri	5	3	8
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	3	5	8
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	5	2	7
5.	Bidang Koperasi & UKM	7	2	9
J u m l a h		26	23	48

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap sesuai dengan jenis kelamin dan masing – masing bidang.

Table 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2021

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	11	7	18
2.	Bidang Industri	1	1	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-	1	2
4.	Bidang Perdagangan	-	1	-

	Luar Negeri			
5.	Bidang Koperasi & UKM	1	1	1
Jumlah		13	11	24

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35 Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Berikut disajikan Tabel Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil per Desember 2021.

Tabel 1.3 Data Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai per Desember 2021

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
6	37	4	-	26	23	9	36	4	3	-	-	

Berikut tabel Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Table 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2021

No.	Bagian / Bidang	P E N D I D I K A N												Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat					1	1	-	3	3	5	1	1	5	10
2.	Bidang Industri					-	-	-	-	5	2	-	-	5	3
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri					-	-	-	-	3	3	-	2	3	5
4	Bidang					-	-	-	-	4	1	1	1	5	2

	Perdagangan Luar Negeri														
5.	Bidang Koperasi & UKM					-	-	-	-	5	2	2	-	7	2
J U M L A H														25	22

Berikut ini disajikan tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 1.5 Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Per Desember 2021

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
13	11	0	12	1	11	0	0	24

Berikut disajikan tabel Pendidikan Pegawai Kontrak menurut jenis kelamin

Tabel 1.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2021

No.	Bagian / Bidang	PENDIDIKAN												Jumlah	
		SD		SLTP		SMA/ SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	10	2	-	-	2	5	-	-	12	7
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
3.	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0

	Dalam Negeri														
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4.	Bidang Koperasi & UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah														15	9

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Isu–isu Strategis Selama rentang waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 9.19% dan pada tahun 2020 sebesar 9.15%, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,04%.
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah.
- 3) Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai ekspor sebesar -9,96% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2019. Salah satu program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.

- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
- 5) Rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing. Sumber Daya Alam Lokal yang tersedia di Kalimantan Utara banyak belum dimanfaatkan untuk dijadikan produk unggulan daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Pada tahun 2020 dari 14.385 UMKM hanya 7.756 UMKM yang mengakses KUR dengan persentase sebesar 52,67%
- 7) Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara, Koperasi sehat adalah Koperasi Aktif, Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2020 dari 755 Koperasi yang ada di Kalimantan Utara terdapat 512 Koperasi Aktif dan hanya ada 104 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja, pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2016.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

Bab IV : Penutup

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Table 2.1. Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Bidang Industri	
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1. Meningkatkan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Mengoptimalkan penyusunan RPIK di Kabupaten Kota 2. Memanfaatkan sarana industri yang terbangun
		2. Mengoptimalkan Pengendalian Izin Usaha Industri	1. Mengoptimalkan sinkronisasi antara Organisasi/Lembaga/ Masyarakat dalam mendukung Program Pengembangan Industri 2. Meningkatkan Rendahnya pemahaman stakeholder terhadap proses

			penerbitan izin industri
		3. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Mengoptimalkan informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara
		Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Mengoptimalkan pembangunan jaringan infrastruktur dengan baik dan merata
		2. Menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Mempertahankan Subsidi Ongkos Angkut Barang 2. Memantau pelaksanaan distribusi barang
		3. Meningkatkan Perlindungan Konsumen	1. Melakukan pengawasan barang beredar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan dalam pemberian informasi ke masyarakat terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen
		4. Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Melaksanakan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
		Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		1. Mengoptimalkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Ekspor	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor

		2. Mengembangkan Ekspor	1. Melakukan pelatihan kepada pelaku ekspor agar dapat memenuhi standar ekspor 2. Meningkatkan promosi dan kualitas Produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional
Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Bidang Koperasi dan UKM	
Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Meningkatkan pertumbuhan koperasi sehat 2. Meningkatkan pemahaman tentang koperasi 3. Mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku UKM
		2. Meningkatkan dan Mengembangkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Meningkatkan strategi pemasaran 2. Memperkuat permodalan 3. Mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku UKM

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal. Paliwang, M.Hum sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada Tahun Anggaran 2021 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3 %
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95 %
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5 %
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, pada tahun 2021 telah dilaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya mencapai perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja pada Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun 2021 sesuai dengan Sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3 %	70,37%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95 %	38,87%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5 %	59,35%

4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%	39,74%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	3,8%
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6,94%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%	16%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10 %	27,28%

B. Analisis Hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2021 antara Kepala Daerah dan Kepala OPD, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

Tabel 3.2
Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Karna adanya covid -19 membuat pengawasan kepada koperasi sempat terganggu dikarenakan adanya kebijakan pembatasan yang dikarenakan pencegahan penyebaran covid-19 dan pengawasan secara daring dirasa tidak terlalu optimal, oleh karena itu Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementriaan Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat.	Untuk menjaga dan menumbuhkan koperasi sehat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang ada secara daring dan secara langsung saat tidak terjadi kegiatan pembatasan covid - 19
	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait KUR secara langsung saat pembatasan covid -19 di perlonggar

		daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media social tidak dapat diakses secara maksimal	
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Dikarenakan pandemi Covid -19 banyak UMKM yang sempat menutup usahanya karena minimnya pemasukan.	Dinas perindagkop melakukan pemberian bantuan stimulant permodalan kepada UMKM yang terdampak Covid -19.
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai
3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur dari kepolisian untuk menyampaikan pelanggaran atas penjualan barang ilegal

	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat ketentuan jual.	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual
4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Masih didapati perusahaan yang tidak melakukan pembaharuan izin usahanya.	Melakukan sosialisasi kepada kabupaten dan kota terkait proses izin industri yang harus di perbaharui oleh pelaku industri

C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2020

Dalam Pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2021, tidak terdapat indikator program dan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak memiliki relevansi, antara indikator dan satuan yang terdapat dalam Program maupun Kegiatan yang terdapat dalam renstra 2021 - 2026

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan dapat dilihat pula perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai antara lain adalah;

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3 %	70,37%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95 %	38,87%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5 %	59,35%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%	39,74%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	3,8%
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6,94%

7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%	16%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10 %	27,28%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi serta capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan secara menyeluruh dikarenakan terdapat perbandingan Indikator Kinerja dengan tahun 2020, terdapat perbedaan pada target sasaran dan indikator kinerja, sehingga menyebabkan perbedaan dalam realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan secara menyeluruh hal ini juga dikarenakan telah dilakukannya penyusunan terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2021-2026. Sehingga pada bagian ini hanya akan menyajikan perbandingan kinerja yang memiliki indikator yang sama.

Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2020-2021

No	Sasaran Strategis 2020	Indikator Kinerja 2020	Capaian Kinerja	Sasaran Strategis 2021	Indikator Kinerja 2021	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya daya saing industri	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	8,87%	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	27,28%

2	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/ barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	7,5%	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,94%
---	---	---	------	---	---	-------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3 %	70,37%	73%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95 %	38,87%	2%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5 %	59,35%	9,5%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%	39,74%	3,1%

5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	3,8%	3 ± 1
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6,94%	4%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%	16%	30%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10 %	27,28%	17,74%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat standar nasional pada urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan capaian kinerja di tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM melakukan upaya maksimal yang dengan tetap melakukan pengawasan kepada koperasi melalui daring selama masa pandemic Covid -19 dan melakukan optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan secara langsung saat kebijakan pembatasan telah ditiadakan, dan terdapat UMKM yang ingin mengetahui informasi terkait akses KUR untuk dapat digunakan untuk mengkases KUR ke perbankan sehingga dapat meningkatkan usaha yang dijalankan, sedangkan pada Pengembangan UMKM keberhasilan peningkatan jumlah UMKM dikarenakan banyaknya usah mikro yang tumbuh hal ini disebabkan oleh efek dari adanya pandemic covid -19 yang menyebabkan masyarakat membka usaha untuk mencari pendapatan melalui usaha mikro.
 - b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri meberikan sosialisasi kepada calon pelaku eksportir yang bertujuan agar para pelaku ekspor menggunakan SKA dalam dokumen ekspornya, sehingga dapat tercatat sebagai nilai eskpor kaltara hal ini dapat berjalan karena adanya upaya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk menjalankan proses ekspor sesuai dengan ketentuan , Bidang Perdagangan Luar Negeri juga melakukan peningkatan citra produk yang bertujuan agar pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing dan menjadi produk eskpor Kalimantan Utara, hal ini ditujukan agar dapat meningkatkan nilai ekspor bersih Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021.
 - c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan upaya percepatan pembangunan industri melalui penetapan rancangan penetapan pembangunan industri yang ada di kabupaten dan kota, serta melakukan pengawasan sosialiasi terkait perizinan industri hal tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Kaimantan Utara.
 - d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri dapat melaksanakan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut ke
-

daerah perbatasan Kalimantan Utara untuk menekan harga jual yang ada di daerah perbatasan yang masuk dalam kategori terdepan, terpencil dan tertinggal, selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting di Provinsi Kalimantan Utara untuk menjaga stabilitas harga barang pokok dan penting, untuk upaya peningkatan penjualan produk lokal dilakukan sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal Kalimantan Utara yang telah memenuhi syarat ketentuan jual kegiatan–kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menunjang peningkatan PDRB sektor perdagangan di Kalimantan Utara.

Kegagalan :

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis OPD dan hanya terdapat kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis OPD seperti yang telah disampaikan pada tabel 3.2 yang membahas tentang Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Solusi :

Solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2021 juga telah dibahas pada tabel 3.2 yang membahas tentang Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sampai dengan akhir Desember tahun 2020 Dinas Perindagkop dan UKM memiliki jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung didukung oleh oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35

Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Dalam efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang ada Dinas Perindagkop dan UKM menempatkan pegawai dengan beban kerja yang cukup merata walaupun masih didapati beberapa jabatan yang belum sesuai dengan jabatannya namun keinginan untuk selalu belajar dan meningkatkan kapasitas diri pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi nilai tambah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menerima Pagu Anggaran sebesar Rp.37.367.432.670 dan pada Perubahan Anggaran pada bulan Agustus 2021 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Rp. 26.700.622.984

Belanja Langsung :

a. Sekretariat

Alokasi anggaran Rp. 11.101.327.785 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9168.219.842, dengan persentase 82,59% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 1.933.107.943

b. Perindustrian

Alokasi anggaran Rp.1.236.917.244 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 828.156.658, dengan persentase 66,95% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 408.760.586

c. Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi anggaran Rp. 9.680.256.199 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.120.497.622, dengan persentase 94,22% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 559.758.577

d. Perdagangan Luar Negeri

Alokasi anggaran Rp. 635.510.105 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 499.696.384, dengan persentase 78,63% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 135.813.721

e. Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Rp. 4.046.611.651 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.480.950.658, dengan persentase 61,31% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 1.565.660.993

7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2020, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala OPD seperti pada sajian tabel berikut;

Tabel 3.7 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2021		Sasaran Strategis PK 2021	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Keterangan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	179.662.090	61.697.300	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Sehat	Presentase Koperasi Aktif	68,30%	70,37%	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	179.662.090	61.697.300					

	Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	179.662.090	61.697.300					
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.790.416.000	1.081.239.308	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95%	38,87%	
	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.790.416.000	1.081.239.308					
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.790.416.000	1.081.239.308					
3	Program Pengembangan UMKM	2.076.533.561	1.338.014.050	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	59,35%	
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.076.533.561	1.388.014.050					
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan	2.076.533.561	1.388.014.050					

	Teknologi							
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	141.655.256	106.672.157	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,20%	39,74%	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	141.655.256	106.672.157					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	141.655.256	106.672.157					
5	Program Pengembangan Ekspor	493,854,849	393,024,227	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,20%		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	493,854,849	393,024,227					
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	21.930.000	18.059.552					
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	219.497.545	149.020.966					
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	252.427.304	225.943.709					
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.024.999.281	8.561.361.600	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Presentasi inflasi pangan bergejolak	3 ± 1		

	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	9.024.999.281	8.561.361.600	barang kebutuhan pokok di daerah				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Industri	9.629.552.667	6.807.024.854					
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	273,946,320	218,548,336	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1		
	Menjamin Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	64.253.545	61.602.000					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	64.253.545	61.602.000					
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	209.692.775	156.946.336					
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	59.693.640	47.813.700					

	Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten /Kota							
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.135	109.132.636					
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	345.560.000	323.560.000	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Presentase Barang yang Tidak Sesuai Standar	7%		
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten /Kota	119.640.000	108.840.000					
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	118.100.000	107.300.000					
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1.540.000	1.540.000					
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	225.659.098	214.720.000					
	Peningkatan kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Atau Jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	225.659.098	214.720.000					
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	36.011.500	17.027.686	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan	2,50%		

	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	36.011.500	17.027.686		Produk Lokal terhadap PDRB			
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	28.611.500	12.747.474					
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	7.400.000	4.280.000					
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	919.729.509	671.800.658	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10%		
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	919.729.509	671.800.658					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	252.554.072	112.574.000					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	90.000.000	88.825.000					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	577.175.437	470.401.658					
11	Program Pengendalian Izin Usaha industri	174.241.787	64.699.000	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor	10%		

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	174.241.787	64.699.000		industri			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	174.241.787	64.699.000					
12	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	142.945.948	91.657.000	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10%		
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	142.945.948	91.657.000					
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	6.650.000	6.570.000					
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data SIINas	136.295.948	85.087.000					

BAB IV

PENUTUP

i. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2021 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan

kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kinerja, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

ii. Hasil Analisis Hambatan dari Bab III Sasaran

Hasil analisis hambatan yang disajikan pada Bab III akan disajikan kembali dalam tabel berikut;

Tabel 4.1 Analisis Hambatan

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Karna adanya covid -19 membuat pengawasan kepada koperasi sempat terganggu dikarenakan adanya kebijakan pembatasan yang dikarenakan pencegahan penyebaran covid-19 dan pengawasan secara daring dirasa tidak terlalu optimal, oleh karena itu Masih terdapat koperasi yang	Untuk menjaga dan menumbuhkan koperasi sehat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang ada secara daring dan secara langsung saat tidak terjadi kegiatan pembatasan covid - 19

		tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementrian Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat.	
	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media social tidak dapat diakses secara maksimal	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait KUR secara langsung saat pembatasan covid -19 di perlonggar
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Dikarenakan pandemi Covid -19 banyak UMKM yang sempat menutup usahanya karena minimnya pemasukan.	Dinas perindagkop melakukan pemberian bantuan stimulant permodalan kepada UMKM yang terdampak Covid -19.
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai

3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur dari kepolisian untuk menyampaikan pelanggaran atas penjualan barang ilegal
	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat ketentuan jual.	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual

4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Masih didapati perusahaan yang tidak melakukan pembaharuan izin usahanya.	Melakukan sosialisasi kepada kabupaten dan kota terkait proses izin industri yang harus di perbaharui oleh pelaku industri
---	---	---	--

iii. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk Mengatasi Hambatan yang terjadi ditahun selanjutnya maka akan dilakukan langkah-langkah berupa :

Tabel 4.1 Rencana Penanganan Hambatan Di Tahun Berikutnya

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Karna adanya covid -19 membuat pengawasan kepada koperasi sempat terganggu dikarenakan adanya kebijakan pembatasan yang dikarenakan pencegahan penyebaran covid-19 dan pengawasan secara daring dirasa tidak terlalu optimal, oleh karena itu Masih terdapat koperasi yang	Untuk menjaga dan menumbuhkan koperasi sehat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan monitoring dan evaluasi kepada koperasi yang ada secara daring dan secara langsung saat tidak terjadi kegiatan pembatasan covid - 19

		tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementrian Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat.	
	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media social tidak dapat diakses secara maksimal	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait KUR secara langsung saat pembatasan covid -19 di perlonggar
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Dikarenakan pandemi Covid -19 banyak UMKM yang sempat menutup usahanya karena minimnya pemasukan.	Dinas perindagkop melakukan pemberian bantuan stimulant permodalan kepada UMKM yang terdampak Covid -19.
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai

3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan unsur dari kepolisian untuk menyampaikan pelanggaran atas penjualan barang ilegal
	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat ketentuan jual.	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual

4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Masih didapati perusahaan yang tidak melakukan pembaharuan izin usahanya.	Melakukan sosialisasi kepada kabupaten dan kota terkait proses izin industri yang harus di perbaharui oleh pelaku industri
---	---	---	--

iv. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dengan itu pula telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan indikator dan target sasaran yang lebih relevan dan dapat diukur;

Tabel 4.3 Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Renstra

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS PK 2020	INDIKATOR KINERJA PK 2020	TARGET PK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Persentase Koperasi Aktif	68,3%

	koperasi dan UMKM	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,9%
		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%
2	Meningkatkan Neraca Perdagangan Ekspor Kalimantan Utara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%
3	Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%
		Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%

4	Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10%
---	--	---	---	---	---	-----

Plt. Kepala Dinas,



Hj. Hasriyani, SH, MM

Pembina TK. I. IV/b

NIP. 197307172003122008

Ringkasan Eksekutif

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35 Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

A. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

Table Pemetaan masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat	1. Belum optimalnya peran koperasi	1. Cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif. 2. Masih rendahnya pemahaman tentang koperasi.
		2. Belum	1. Keterbatasan permodalan.

		berkembang nya usaha ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 2. Masih rendahnya strategi pemasaran. 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap pelaksana koperasi dan pelaku UKM.
2	Tingginya ketergantungan terhadap suplai kebutuhan pokok masyarakat dan tingkat konsumsi produk dari luar wilayah	1. Tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rantai distribusi barang sangat panjang. 2. Mahalnya ongkos angkut barang. 3. HET tidak dapat dijadikan acuan. 4. Jaringan infrastruktur belum terbangun dengan baik dan merata.
		2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Minimnya informasi masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen terhadap peredaran barang dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan
3	rendahnya neraca perdagangan ekspor	Menurunnya tren nilai ekspor bersih.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi standar ekspor. 2. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor 3. Produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional
4	Masih rendahnya kemampuan industri terhadap kontribusi perekonomian daerah	Belum optimalnya pengembangan sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara belum menyusun RPIK 2. Belum termanfaatkannya sarana industri yang telah dibangun 3. Belum optimalnya sinkronisasi antara Organisasi/Lembaga/ Masyarakat dalam mendukung Program

			Pengembangan Industri 4. Rendahnya pemahaman stakeholder terhadap proses penerbitan izin industri 5. Rendahnya informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara
--	--	--	--

Dari pemetaan masalah tersebut menghasilkan isu strategis yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- 1) Rendahnya pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 9.19% dan pada tahun 2020 sebesar 9.15%, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,04%.
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah.
- 3) Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai ekspor sebesar -9,96% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2019. Salah satu program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.

- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
- 5) Rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing. Sumber Daya Alam Lokal yang tersedia di Kalimantan Utara banyak belum dimanfaatkan untuk dijadikan produk unggulan daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Pada tahun 2020 dari 14.385 UMKM hanya 7.756 UMKM yang mengakses KUR dengan persentase sebesar 52,67%
- 7) Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara, Koperasi sehat adalah Koperasi Aktif, Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2020 dari 755 Koperasi yang ada di Kalimantan Utara terdapat 512 Koperasi Aktif dan hanya ada 104 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat.

B. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian kinerja yang ada pada tahun 2021 adalah gambaran dari keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian perjanjian kinerja yang telah di perjabikan antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah, dan berikut merupakan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021

***Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan
UKM Tahun 2021***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	68,3 %	70,37%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,95 %	38,87%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5 %	59,35%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,2%	39,74%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	3,8%

6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6,94%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	2,5%	16%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	10 %	27,28

C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan OPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural

dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2021 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kinerja, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.